

www.koranusantara.com



PRILLY LATUCONSINA SUSAH MOVE ON





Budi Karya Sumadi memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

DUGAAN SUAP DI DITJEN PERKERETAAPIAN, MENHUB DIPERIKSA KPK 10 JAM

KORANUSANTARA- Satu per satu, menteri di Kabinet Indonesia Maju berurusan dengan kasus korupsi. Setelah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dipanggil sebagai saksi di Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu, 26 Juli 2023, giliran Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berbeda dengan Airlangga yang dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya, Budi diperiksa terkait perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Budi menjadi saksi dalam kasus yang diungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) itu.

Budi tiba di gedung KPK lama (C1) di Jalan Rasuna Said, Jakarta sekitar pukul 07.30 WIB. Dia langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Selanjutnya pada pukul 17.30 WIB, Budi keluar dari gedung tersebut, lalu memberikan keterangan terkait pemeriksaan. Total, Budi

diperiksa selama kurang lebih 10 jam.

Budi menjelaskan, pihaknya dimintai keterangan seputar dugaan korupsi di Ditjen Perkeretaapian. Namun, Budi enggan mengungkapkan lebih rinci apa saja yang didalami penyidik terkait dengan kapasitasnya sebagai menteri. "Hari ini (kemarin) saya telah hadir sebagai saksi dugaan korupsi dari (Ditjen) Perkeretaapian," ungkapnya.

Terlepas dari substansi perkara, Budi menyebut pihaknya mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Menurutnya, Kemenhub mendukung dan berkomitmen atas upaya tersebut. "Hal-hal lain yang berkaitan dengan pemeriksaan tadi telah disampaikan dengan pemeriksa," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di beberapa wilayah. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya merupakan salah satu tersangka dalam kasus tersebut. (*)



Anies Baswedan menghadiri Rakernas Apdesi 2023 di Jambi, Rabu, 26 Juli 2023.

JADI PRESIDEN, ANIES JANJI TINGKATKAN DANA DESA

KORANUSANTARA calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menghadiri Rakernas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) 2023 di Balairung Universitas Jambi. Rabu. 26 Juli 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Anies menyampaikan visi dan gagasannya tentang pembangunan desa. Menurut dia, ada tiga hal yang harus dilakukan dalam gagasan pembangunan desa. "Peningkatan dana desa, otoritas belanja yang sesuai dengan kebutuhan desa, dan pendampingan desa yang profesional," ungkap Anies dalam keterangan persnya.

Mantan gubernur DKI itu mengungkapkan pentingnya pendamping desa yang profesional. Dengan demikian, kepala desa memiliki mitra yang menguatkan dalam pembangunan desa. Tak boleh ada lagi pendamping desa berkat titipan pihak-pihak tertentu, tanpa ditopang kualitas dan kualifikasi yang jelas. "Hanya dengan cara itu, maka akan lahir desa yang kuat dan mandiri," jelas Anies.

Anies mengatakan, program yang baik tentang desa saat ini tidak boleh dihentikan. Pernyataan itu menjawab informasi yang beredar bahwa dia akan mengubah kebijakan tentang desa jika terpilih menjadi presiden. Justru, Anies berjanji akan meningkatkan dana desa agar masyarakat semakin sejahtera. "Dana desa akan kita tingkatkan. Makanya, dalam matriks kebijakan itu, ada empat hal yang harus dipahami," ujar mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) itu.

Tentu, lanjut Anies, ada kebija-

kan yang diteruskan. Namun, ada pula yang dikoreksi. Selain itu, ada kebijakan yang dihentikan dan ada kebijakan baru yang perlu dibuat. Kepala desa akan diberi kewenangan penuh untuk menentukan kebutuhan masing-masing. "Yang tahu masalah sesungguhnya adalah kepala desa. Apa yang harus ditingkatkan, dan apa yang mesti dikoreksi," tuturnya.

Asyuro, kepala Desa Mersan, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, menaruh harapan kepada Anies jika nanti terpilih menjadi presiden. Misalnya, gagasan kesetaraan dan keadilan yang kerap disampaikan Anies harus diterapkan dalam konsep pembangunan desa di seluruh Indonesia. "Saya berharap Pak Anies membangun desa-desa yang kurang berkembang dan tertinggal dari desa-desa lain," ucapnya. (*)



Prabowo Subianto santer dikabarkan menggaet Erick Thohir untuk pilpres. Sementara Muhaimin Iskandar termasuk dalam lima nama kandidat pendamping Ganjar Pranowo.

KESOLIDAN KOALISI KEBANGKITAN INDONESIA RAYA TENGAH DIUJI

KORANUSANTARA – Kesolidan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) tengah diuji. Ketua umumnya, baik Gerindra maupun PKB, sama-sama didekati elite politik, tidak terkecuali Presiden Joko Widodo.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi memiliki agenda bareng Prabowo Subianto, ketua umum Gerinda. Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Prabowo membersamai Presiden saat ke PT Pindad di Malang, Jatim, Senin, 24 Juli 2023.

Sebelumnya, kebersamaan Jokowi, Prabowo, dan Erick itu juga kerap terjadi. Baik di istana maupun dalam sebuah kegiatan. Karena itu, sejumlah pihak pun menyebut, pemandangan itu merupakan sinyal bahwa ada kans Prabowo-Erick bakal berpasangan sebagai capres-cawapres. Terlebih, Erick juga disodorkan PAN sebagai bacawapres sebagai satu syarat

dalam berkoalisi.

Namun, menanggapi itu, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid menilai biasa kebersamaan tersebut. Prabowo dan Erick bertemu dalam sebuah acara pemerintahan. Dengan begitu, tidak perlu dipersoalkan. "Nyetir mobil kan biasa, tidak ada kaitannya dengan pilpres," ucapnya ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Selasa, 25 Juli 2023.

Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, mengatakan, sampai saat ini PKB tetap bersama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). PKB tetap berkomitmen dengan perjanjian yang sudah ditandatangani bersama. Soal nama capres-cawapres, tetap sesuai kesepakatan kerja sama. Bahwa, penentuan pasangan calon akan diputuskan ketua umum PKB dan ketua umum Gerindra.

Jazil kembali menyatakan bahwa Prabowo pernah menyampaikan bahwa nama cawapres ada di tangan Muhaimin Iskandar. Demikian juga elite Gerindra. Adapun PKB sendiri sudah memutuskan bahwa Muhaimin harus menjadi capres atau cawapres. "Gus Muhaimin harus ada di kertas suara," tegasnya.

Soal nama Erick, lanjut Jazil, sejauh ini tidak ada nama tersebut dalam daftar kandidat capres-cawapres KKIR. Karena itu, pihaknya meyakini Prabowo akan tetap amanah. "Pak Prabowo merupakan sosok yang amanah dan tidak gampang berkhianat. Apalagi, Pak Prabowo sudah tahu rasanya dikhianati. Jadi, nggak mungkin akan berkhianat," kata wakil ketua MPR itu.

Beberapa waktu lalu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan jika bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendamping Ganjar Pranowo sudah mengerucut menjadi lima nama. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar termasuk dalam lima nama tersebut.(*)





PRILLY LATUCONSINA SUSAH MOVE ON

KORANUSANTARA – Belum ada pangeran berkuda yang sanggup mengisi hati Prilly Latuconsina. Setelah jalinan asmaranya dengan Maxime Bouttier kandas, Prilly sampai saat ini masih betah menjomblo.

Sementara Maxime dikabarkan menjalin kedekatan dengan Luna Maya. Keduanya pun disebut akan melangkah ke jenjang yang lebih serius. "Senang lah pasti. Aku sangat happy kalau lihat mantan happy," ujar Prilly.

Kurang apa Prilly? Paras cantik dan karier mapan di usia muda. Hanya, Bintang film Danur Universe itu mengaku tidak pernah bisa membuka hati untuk pria lain

dengan cepat setelah putus.

Dia selalu butuh waktu lama untuk bisa terbebas dari bayang-bayang mantan kekasih. "Move on paling cepat? Nggak pernah. Kalau paling lama, mungkin dua tahun. Aku memang orangnya susah move on," kata Prilly belum lama ini.

Aktris sekaligus produser berusia 26 tahun tersebut mengaku tidak tahu pasti penyebabnya. Padahal, di lubuk hati terdalam, Prilly juga ingin segera memiliki pasangan baru. "Nggak tahu kenapa, susah aja. Aku memang bukan tipe orang yang mudah gantikan posisi orang lain gitu sih," tuturnya. (*)

K oran DIGITAL







PASANG IKLAN HUBUNGI 0811 5405 033



5 ORANG TERINDIK POSITIF ZAT ADIKTIF

467 PERSONIL POLDA KALTIM DITES URINE

BACA HALAMAN 2-3



WAKIL WALI KOTA SAMARINDA RESMI LUNCURKAN KAMPUNG MODERASI BERAGAMA

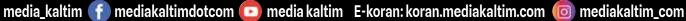
BACA HALAMAN 38















Divpropam Mabes Polri melaksanakan penegakan ketertiban dan displin (Gaktibplin) terhadap personel Polri di Kalimantan Timur, Senin (24/7/2023).

467 Personil Polda Kaltim Dites Urine

5 Personil Terindikasi Positif Zat Adiktif

BALIKPAPAN-Divpropam Mabes Polri melaksanakan penegakan ketertiban dan displin (Gaktibplin) terhadap personel Polri di Kalimantan Timur, Senin (24/7/2023). Pada Gaktibplin meliputi pemeriksaan terhadap sikap tampang, kelengkapan administrasi, dan cek urine dari para anggota.

Tujuan utama dari Gaktibplin adalah untuk memastikan bahwa setiap personel Polda Kaltim tetap mematuhi kode etik dan standar operasional yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.



Atiqah Mumtazah A Bura Datu, S.H., M.H

Direktur. Rini Ernawati; General Manager. Darman; Manager Media Kaltimtara: Dedi Suhendra Penanggungjawab/
Pemimpin Redaksi: Muhammad Abduh Kuddu; Reporter. Yusva Alam, Nur Yahya, Viqih Jati Kusuma, Andi Desky, Iqlima
Syih Syakurah: Biro dan Perwakilan: Muhammad Rafi'i (Biro Kutai Kartanegara), Nur Robbi Syai'an (Biro Penajam Paser
Utara), Ramlah (Biro Kutai Timur); Andhika Dezwan AS (Biro Berau), Andrie Aprianto (Biro Balikpapan), Bhakti Sihombing
(Biro Paser); Teknologi dan Informasi: Iqbal Yudiar Syahputra S.Kom; Manager Kreatif: Theophilus.

Alamat Redaksi: Jalan Gunung Kawi No 3 Rt 39 Perum Bukit Sekatup Damai (BSD) Kelurahan Gunung Elai Bontang Utara, Kota Bontang. Email; redaksi@mediakaltim.com. Diterbitkan PT MEDIA KALTIM PROMOSINDO, Berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor AHU-0033303.AH.01.01 Tahun 2020.



UTAMA



Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sebanyak 37 anggota lakukan pelanggaran sikap tampang. Mulai dari rambut, jenggot, dan atribut.

Selain itu, kelengkapan administrasi juga menjadi fokus dalam Gaktibplin ini. Setiap personel diwajibkan melengkapi administrasi dan dokumen pribadi, termasuk identitas, surat izin, dan berkas-berkas lainnya.

Tidak kalah pentingnya adalah cek urine yang dilakukan dalam proses Gaktibplin. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota kepolisian tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Dari hasil pemeriksaan terhadap 467 sampel urine personel, ditemukan 5 personel didapati terindikasi positif Metamfetamin.

Dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, adanya 5 personel yang terindikasi positif Methamphetamine tersebut telah didalami oleh Biddokkes Polda Kaltim untuk memastikan kandungannya.

"Untuk dua orang sedang menjalani pemulihan di SPN Jonggon. Sebelumnya pernah melanggar, ternyata ditemukan kembali," ujarnya, Rabu (26/7/2023).

Lebih lanjut Yusuf menjelaskan, dua orang lagi tengah mengkonsumsi obat keras yang mengandung metamphetamine berdasarkan resep dokter.

Sementara satu orang lagi, dinyatakan mengkonsumsi obat keras namun tidak bisa menunjukkan riwayat konsumsinya maupun resep dokter.



"Yang 1 orang ini jelas pengaruh bukan resep dokter. Orang ini tidak bisa menunjukkan kalau dia pakai lewat resep obat," jelasnya.

Lebih lanjut pihaknya masih menyelidiki obat keras yang dikonsumsi oleh satu orang ini.

"Jika diperlukan maka akan diproses oleh Paminal. Entah nanti etik atau disiplin, lebih lanjut nanti ditangani di Propam," tutup Yusuf.

Seperti diketahui kelima personel tersebut seluruhnya merupakan tingkatan Bintara. (bom)













DKP3A Kaltim: 51.369 Orang Sudah Aktivasi IKD

SAMARINDA - Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terus berupaya mengembangkan berbagai inovasi baru dalam sistem pelayanan administrasi kependudukan. Salah satunya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat.

Dengan SIAK Terpusat masyarakat akan mendapatkan standar pelayanan yang sama di setiap daerah. Saat ini pengembangan SIAK dilakukan melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang saat ini sedang gencar dilakukan layanan aktivasi kepada masyarakat dengan berbagai macam cara.

"Pengguna Iphone (iOS) sudah

bisa melakukan aktivasi IKD,"ucap Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur, Noryani Sorayalita belum lama ini.

Sementara data masyarakat yang telah mengaktivasi IKD di Provinsi KalimantanTimurberdasarkanlaporanper 15 Juli 2023 sebanyak 51.369 orang atau baru mencapai 1,84 persen.

"Memang masih jauh dari target nasional sebesar 25 persen, tetapi kita tetap semangat melakukan optimalisasi IKD ini," kata Soraya.

Selain itu terobosan terbaru ini, Dukcapil semakin meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerjanya sebab semua pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Dukcapil di daerah bisa dikontrol oleh semua pihak baik pemerintah maupun penduduk.

"Masyarakat akan secara otomatis terupdate datanya di user data Dukcapil yang terdaftar seperti perbankan, lembaga kesehatan, dan sebagainya,"terangnya.

Tambahnya SIAK Terpusat merupakan sistem digitalisasi yang digunakan agar pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dapat terkoneksi daring secara nasional, lebih efisien dari segi sistem keamanan siber dan dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan dengan lebih cepat. (adv/diskominfokaltim)



DISKOMINFO KALTIM



Inovasi MCP Bantu KPK Monitoring Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

SAMARINDA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berinovasi melakukan pencegahan korupsi melalui penguatan sistem. Salah satunya dengan Monitoring Center for Prevention (MCP). MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Tenaga Ahli Direktorat Monitoring Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Sukardi, menjelaskan MCP merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang digawangi KPK, sebagai wujud pencegahan korupsi melalui fungsi supervisi dan monitoring.

"Untuk itu kami berupaya agar pemerintah daerah dapat menjalankan kegiatan pembangunan sesuai ketentuan dan tidak ada pelanggaran hukum", katanya disela memberi pemaparan mengenai Hasil survey Penilaian Integritas (SPI) Kalimantan Timur tahun 2022 dan tindak lanjut SPI 2023 di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (25/7/2023).

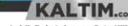
Secara umum Sukardi menjelaskan, MCP memiliki delapan cakupan intervensi yang terdiri atas perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa/kelurahan.

"MCP ini merupakan salah satu potret kinerja pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah atau OPD masing-masing dalam upayanya mencegah terjadinya korupsi", tambahnya.

Di tempat yang sama, setelah mengukuhkan 17 Penyuluh Anti Korupsi pada rangkaian pembukaan kegiatan, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan Pemerintah Daerah melalui instansi terkait dalam hal ini Inspektorat Daerah bekerja maksimal melakukan pembinaan terhadap seluruh OPD, sehingga pencegahan tindak korupsi dapat dilakukan.

Pemprov Kaltim juga menyambut baik sosialisasi MCP dari KPK ini, karena menurutnya dengan MCP ini, maka penyelenggara pemerintah daerah dapat mengetahui apa saja yang perlu dilakukan guna mencegah tindakan korupsi pada Pemerintah Daerah.

"Karena itu, Pemprov Kaltim bersyukur Tim KPK selalu datang melakukan pembinaan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se Kaltim. Sehingga, aparatur pemerintah daerah jauh dari tindak korupsi," tutur Wagub dilansir dari laman Pemprov Kaltim. (adv/ diskominfokaltim)



Koran DIGITAL

Lebih Dekat dengan Satu Klik





JADI PERHATIAN: Wagub Kaltara, Dr Yansen TP, M.Si membuka Rakor Pengendalian Pembangunan Provinsi Kaltara, Rabu (26/7).

Wagub Minta Perangkat Daerah Fokus pada 4 Hal

TANJUNG SELOR- Wakil Gubernur (wagub) Dr Yansen TP, M.Si membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembanguan Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (26/7).

Pada rakor yang digelar di Ruang Serbaguna Gedung Gadis ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan pemerintah provinsi yang meliputi capaian realisasi anggaran. Baik pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana dekonsentrasi, tugas perbantuan dan realisasi kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Wagub berharap melalui rakor ini dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan, mengidentifikasi permasalahan dan penyelesaian sesuai dengan aturan. Serta peningkatan kualitas pelaporan guna menjamin tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Empat progam menjadi perhatiannya meliputi program digitalisasi pemerintahan, peningkatan investasi, pengendalian kemiskinan dan penanganan stunting.

"Saya meminta dalam pelaksanaan pembangunan, kita terus memberikan perhatian khusus kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat,"katanya.

Wagub Yansen juga menyerahkan piagam pengharagaan kepada perangkat daerah yang mencapai realisasi fisik dan keuangan tertinggi pada semester I tahun anggaran 2023.

Perangkat daerah yang dimaksud diantaranya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pendapatan Daerah, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. (dkisp)







LAYANAN MASYARAKAT: Akreditasi menjadi dasar penting untuk kualitas layanan kesehatan masyarakat.

Akreditasi Fondasi Berperan Penting untuk Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat

TANJUNG SELOR - Penting meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, akreditasi bagi Rumah Sakit (RS) menjadi fondasi penting yang tidak dapat diabaikan. Akreditasi adalah langkah kritis untuk memastikan bahwa standar kualitas pelayanan medis terpenuhi dan memberikan keyakinan kepada masyarakat terkait keamanan dan keandalan layanan.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Utara (Kaltara) H. Usman SKM., M.Kes saat mengadakan pertemuan dengan seluruh Rumah Sakit (RS) Pratama yang ada di Kaltara dalam rangka Meningkatkan Pelayanan dan Pemenuhan Standarisasi melalui Akreditasi di Hotel Tarakan Plaza, Kota Tarakan, Rabu (26/7).

Usman menilai, dengan memahami pentingnya akreditasi RS Pratama, diharapkan semua pihak terkait termasuk pemerintah, manajemen rumah sakit, dan tenaga medis, dapat bersama-sama berkomitmen

untuk mencapai dan mempertahankan standar kualitas pelayanan kesehatan yang tinggi.

Menurutnya, akreditasi RS Pratama adalah langkah menuju pelayanan kesehatan yang lebih baik dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mencari perawatan medis yang berkualitas.

"Semua RS Pratama kita undang, narasumber ada dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta ada juga dari Komite Akreditasi Rumah Sakit atau KARS. Nanti akan dibahas dan disampaikan secara terperinci mengenai standar seperti apa yang perlu dipersiapkan oleh RS Pratama," tandasnya.

Terkait meningkatkan mutu dan akreditasi,kata Usman, saat ini masih menunggu standar dari Kemenkes. Setelah itu, barulah setiap RS Pratama berproses untuk akreditasinya.

Dia menjabarkan bahwa Kaltara terdapat 5 RS Pratama, di Kabupaten Malinau ada 2 di RS Pratama Long Apung dan RS Pratama Langat, di Kabupaten Nunukan memliki 3 RS Pratama yaitu RS Pratama Sebatik, RS. Pratama Krayan dan RS Pratama Sebuku.

"Semua RS Pratama yang ada di Kaltara itu sudah beroperasi, namun kendalanya mereka belum terakreditasi. Hal tersebut lantaran belum adanya standar akreditasi untuk RS Pratama oleh Kemenkes," katanya.

Melalui pertemuan, lanjut Usman, akan dibahas standar dan indikator yang ditetapkan oleh Kemenkes. Jika nantinya telah ditetapkan, maka akan segera diajukan anggaran melalui dana BAK untuk kebutuhan penilaian akreditasi, ini juga mengingat lokasi RS Pratama yang berada di daerah, terpencil, perbatasan dan kepulauan.

Harapannya melalui pertemuan ini, seluruh pihak RS Pratama yang ada di wilayah Kaltara dapat berproses untuk akreditasi. Hal ini mengingat bahwa akreditasi fondasi penting untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. (dkisp)





KOTA BARU MANDIRI: Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum meninjau pembangunan gedung DPRD di KBM Tanjung Selor belum lama ini.

Bakal Bangun Perumahan ASN di KBM

TANJUNG SELOR - Pengembangan pusat pemerintahan Kota Baru Mandiri (KBM) terus diseriusi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Setelah adanya pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara dan kantor TVRI Kaltara.

Tidak hanya itu, di KBM juga bakal dibangun perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinas di lingkungan Pemprov Kaltara.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR Perkim) Provinsi Kaltara, Ir. Helmi menjelaskan rencana pembangunan perumahan ASN ini dilakukan di tahun 2024.

"Jadi, peletakan batu pertama pembangunan perumahan ASN ini kita lakukan di awal tahun 2024," ucap Helmi.

Berbeda dengan perumahan lainnya yang kebanyakan dibangun oleh pihak swasta, pembangunan rumah ASN ini nantinya ditangani oleh pihak koperasi sehingga lebih mudah.

"Perumahan ini hanya dikhususkan bagi ASN Kaltara, sementara yang lain seperti PNS kabupaten kota tidak bisa begitu juga dengan pegawai tidak tetap (PTT)," jelasnya. Ia menjelaskan, lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan perumahan ASN ini sekitar 42 hektare. "Lahannya sudah ada, lagi dilakukan pematangan dengan luasan 42 hektare," sebutnya.

Dia menuturkan perumahan ASN ini akan dilengkapi berbagai sarana hingga nantinya perumahan tersebut menjadi kawasan yang elit, di antaranya fasilitas olahraga, pasar, sekolah hingga rumah ibadah.

"Kita rancang dengan sistem kota satelit. Perorangnya nanti mendapatkan lahan 10 kali 16 meter dengan harga kisaran Rp 100 sampai 200 juta," tuntasnya. (dkisp)





AKTIVITAS: Anak-anak di Desa Setulang bermain bola sebagai bentuk aktivitas sosialisasi antar warga.

Mengenal Lebih Dekat Keindahan dan Kehidupan Warga Desa Setulang (1) Hadirkan Keramahan Masyarakat yang Hangat

Selalu menghadirkan keindahan alam yang menakjubkan dan keramahan masyarakatnya yang hangat. Terletak di tengah-tengah hutan tropis yang subur, Setulang menjadi destinasi eksplorasi yang menarik bagi para wisatawan yang ingin menyaksikan keindahan alam Indonesia yang luar biasa.

SETIA PRAMANA PUTRA, DKISP Kaltara

DESA SETULANG merupakan salah satu desa terletak di Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Salah satu daya tarik utama Desa Setulang adalah keindahan alamnya. Dikelilingi oleh pepohonan rimbun, pegunungan yang menjulang, dan sungai yang mengalir deras, desa ini menawarkan panorama alam yang menakjubkan.

Selain pesona alamnya, kehangatan masyarakat Desa Setulang juga menjadi daya tarik tersendiri. Warga desa dikenal ramah dan sambutannya hangat terhadap para tamu yang datang berkunjung.

Putra (34), salah satu rombongan tim Program Layanan Dokter Terbang Kalimantan Utara (Pro Lantera Ku) yang baru saja mengunjungi Desa Setulang, berkata, "Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Alamnya sangat indah, dan penduduknya sangat ramah.

"Saya merasa diterima dengan hangat dan mendapatkan kenangantak terlupakan di sini," ucapnya.

Dengan pesona alamnya dan kehangatan masyarakatnya, Desa Setulang semakin menarik. Keberadaannya menjadi potret kekayaan alam dan budaya Indonesia yang patut dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang.

"Semoga Desa Setulang terus berkembang sebagai destinasi pariwisata unggulan dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal," katanya lagi.

Seperti diketahui, aktivitas masyarakat Desa Setulang sehari-hari adalah bertani dan berkebun. Disebut sebagai Desa Wisata, Di Desa Setulang kita bisa melihat banyak hal yang berkaitan dengan seni dan budaya khas yang masih dilestarikan budaya adat Dayak Kenyah (Oma Lung).

Bersama 4 desa wisata yang ada di Kabupaten Malinau, Desa Setulang telah diresmikan menjadi kawasan tujuan wisata Kabupaten Malinau pada tanggal 28 Oktober 2013 lalu. Warga di sana tak hanya mempertahankan bahasa, hukum adat, tetapi juga budaya dalam kehidupan sehari-harinya. (bersambung)



DLH PPU





ROBBI/MEDIAKALTMGROUP

Kepala DLH PPU, Tita Deritayati

DLH PPU Dorong Kelurahan/Desa Kelola Bank Sampah

PPU - Salah satu cara mengelola sampah rumah tangga yang baik ialah dengan mengelola bank sampah unit (BSU). Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Penajam Paser Utara (PPU) mendorong lembaga pemerintahan membentuknya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU, Tita Deritayati mengatakan program BSU yang telah dijalankan sejak beberapa tahun lalu di Benuo Taka mulai terasa dampak positifnya. Salah satunya ialah dengan berkurangnya timbulan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA).

"Sampai saat ini, sudah terbentuk lebih dari 100 bank sampah unit di PPU. Di lingkungan yang aktif, timbulan sampahnya berkurang, dan mereka juga mulai menerima manfaat lain dari itu," ucap dia, Rabu (26/7/2023).

BSU yang telah terbentuk itu ada dari berbagai kategori. Ada yang dikelola langsung oleh masyarakat/ kelompok, sekolahan dan juga dari organisasi perangkat daera (OPD).

Belakangan juga lembaga pemerintahan desa (pemdes) juga mulai menangkap peluang ini. Tentu DLH PPU mengapresiasi langkah yang dilakukan jajaran pemerintahan di tingkatan terendah ini melalui badan usaha milik desa (Bumdes).

Menurut Tita, hal ini akan lebih mempermudah dalam pengelolaan sampah di lingkungan terdekat masyarakat. Selain dapat berperan dalam menjaga kebersiahn lingkungan, juga dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat dan pengelola BSU tersebut.

"Kami sangat senang atas hadirnya Bumdes Desa Girimukti yang ikut serta dalam pengelolaan bank sampah ini. Kami juga tidak menutup siapapun yang ingin membentuk dan mengelola bank sampah ini," ujar dia.

Tita berharap, adanya pemdes yang memiliki BSU ini juga dapat memicu desa dan kelurahan lain untuk berbuat serupa.

Kehadiran ini dalam pengelolaannya diharapkan dapat menjadi pemacu Desa atau Kelurahan lainnya dapat menangkap sebuah peluang. Dengan ini permasalahan yang selama ini menjadi masalah klasik bagi masyarakat dapat teratasi secara signifikan.

"Harapannya jelas pengelolaan ini dapat menjadi pemacu bagi desa maupun kelurahan lainnya dalam penekan sampah itu sendiri. Bukan hanya menjadi pemacu saja, akan tetapi hal yang dilakukan ini kan dapat pula menguntungkan berbagai pihak dari segi ekonominya," pungkas Tita. (adv/nrd/sbk)



RELAWAN GANJAR



Relawan Mak Ganjar saat mengadakan pelatihan membuat es jeruk Songkit di Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur.

Mak Ganjar Latih Ibu-Ibu Buat Es Jeruk Khas Kalimantan Timur

BONTANG - Sukarelawan Mak Ganjar tidak ada henti-hentinya melakukan kegiatan positif dan bermanfaat kepada masyarakat luas, khususnya ibu-ibu di Kalimantan Timur.

Kali ini, perempuan pendukung Ganjar Pranowo itu mengadakan pelatihan membuat es jeruk Songkit di Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur.

Koordinator Wilayah Mak Ganjar Kaltim, Ernawati Siregar mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memberikan kemampuan kepada para ibu-ibu dalam membuat sajian minuman khas Kaltim itu.

Menurutnya, untuk membuat minuman tersebut tidaklah sulit. Bahan bakunya pun mudah untuk didapatkan.





"Minuman ini bahan bakunya tidak sulit didapatkan dan manfaatnya sangat banyak untuk tubuh," ujar Ernawati, Rabu (26/7/2023).

Lebih lanjut Ernawati menjelaskan, kegiatan tersebut tidak hanya diikuti dari ibu-ibu di Kota Bontang saja, tetapi dari Pulau Jawa. Sehingga mereka sangat senang bisa mengikuti pelatihan tersebut.

"Ibu-ibu yang hadir ada yang berasal dari pulau Jawa, sehingga ketertarikan dalam pelatihan ini sangat luar biasa," jelasnya.

Dalam pelatihan tersebut, relawan Mak Ganjar menyediakan semua bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat minuman tersebut.

Para peserta mempraktekan langsung cara membuat es jeruk Songkit. Selain itu, sebagian peserta ada yang mencicipi menimuan khas Kaltim tersebut. Menurutnya, minuman tersebut sangat cocok dinikmati dalam kondisi cuaca yang panas.

"Minuman ini memiliki cita rasa yang segar, apalagi minumnya dalam cuaca yang panas," tambahnya.

Disela kegiatan tersebut, Ernawati juga tidak lupa memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 kepada para peserta.



Dia mengaku para ibu-ibu sangat antusias dan siap mendukung Gubernur Jawa Tengah itu menjadi Presiden Indonesia.

"Alhamdulillah ibu-ibu pada sen-

ang dan suka terhadap bapak Ganjar Pranowo. Semoga bapak Ganjar menjadi presiden RI 2024," kata Ernawati. (ADV/Bom)







+62 811-5405-033 - 082352365484

TENGGARONG +62 822-5079-0691









































DENGAN TEMA: TERDEPAN

18 Agustus 2023 melalui akun Ig @media_kaltim

PENYERAHAN HADIAH PEMENANG 20 Agustus 2023 (Event jalan Sehat HUT Media Kaltim)



PEMILIHAN JUARA:

- 1. Juara Terbaik: Teknik pengambilan gambar, audio, kesesuaian dengan tema, pencahayaan, pemilihan musik.
- 2. Juara Favorit: Jumlah like dan komen

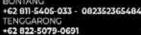
SYARAT & KETENTUAN:

- Peserta merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Kaltim.
- 2. Wajib memposting video pada akun asli instagram untuk satu videonya.
- 3. Wajib upload di IG pribadi dengan menggunakan hastag #hutmediakaltimke-3 #mediaterdepan
- 4. Wajib Follow akun IG @media_kaltim
- 5. Wajib menggunakan logo HUT Media Kaltim & kata: TERDEPAN (tema HUT Media Kaltim)
- Tidak mengandung unsur SARA, merendahkan kelompok/organisasi tertentu.
- 7. Tidak ada unsur plagiarisme
- 8. Durasi maksimal 1 menit





SAMARINDA +62 821-5783-0863 - 05348943982 BONTANG +62 811-5405-033 - 082352365484































































0822 5576 2256 0822 5079 0691

































MINGGU 6 Agustus 2023

JADWAL PERTANDINGAN

START Jam 11.00

KICK OFF

20K / SLOT MRH - 1 PLRYER 2 SLOT

REGISTRASI

VENUE

CLASSIC PLAYSTATION TENGGARONG. JLN MANGKURAJA

(10 METER DARI TRIKIE URPE STORE / SEBELUM TRHEE ALL CRFFE)



SSTEMOVEUR

- SPEED 0 -
- CAMERA DINAMIC WIDE 0-10 -
- STAMINA PEMAIN NORMAL
 - **CLUB BEBRS** -
 - TIME PENSISIHAN 8 MENIT -
 - SEMI FINAL 10 MENIT -
- EXTRA TIME OFF (PINALTY ON) -





































BONTANG



Wawali Najirah (kanan) saat menerima penghargaan KLA 2023. (ist)

Penghargaan Kota Layak Anak 2023, Bontang Raih Predikat Nindya

BONTANG - Kota Bontang berhasil meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) 2023 untuk kategori Nindya. Malam penghargaan dilaksanakan, Sabtu (22/7/2023) di Hotel Padma, Semarang. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati kepada Wawali Bontang, Najirah.

Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak 2023 adalah program yang diusung oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, agar semua Pemerintah Daerah termasuk Kabupaten/ Kota mampu menjalankan seluruh program pembangunan yang berorientasi pada hak dan kewajiban anak. Bersama dengan 75 kabupaten/ kota lain, berhasil mencapai kategori nindya setelah memenuhi indikator yang ditetapan meliputi penguatan kelembagaan dan klaster hak anak.

"Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak ini merupakan suatu bentuk apresiasi kami atas segala komitmen dan keseriusan para gubernur, bupati, wali kota, dan jajarannya yang telah serius berupaya menghadirkan wilayahnya yang aman bagi anak. Amanat kontitusi pun mewajibkan negara untuk memenuhi semua hak anak, melindungi anak, dan menghargai pandangan anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui peraturan perundangan lainnya," ungkap Menteri PPPA dalam sambutannya mengutip dari situs ppid.bontangkota.go.id.

Atas pencapaian ini, Najirah meminta kerjasama dari OPD pengampu KLA dan dinas terkait, untuk ter-

us meningkatkan kinerjanya. Najirah menyampaikan bahwa Bontang memiliki niat untuk menaikan pencapaian menjadi katergori utama di tahun berikutnya.

"Dengan kolaborasi antara Kota Bontang dan kota/kabupaten lainnya, kami yakin dapat mencapainya," ungkapnya.

Selain itu, Najirah juga meminta dukungan penuh kepada Kepala DPPKB Kota Bontang, Bahauddin yang turut hadir mendampingi pada malam apresiasi KLA, agar semakin memaksimalkan program kegiatan serta merapatkan barisan dan bersinergi bersama perangkat daerah dan stakeholders terkait.

Wawali juga menekankan bahwa pencapaian ini adalah hasil kerja keras dari semua pihak tanpa terkecuali. Harapannya adalah agar sinergitas dapat terus terjaga agar ke depannya Kota Bontang dapat mencapai apa yang ditargetkan yaitu Kota Layak Anak Kategori Utama. (*)



BONTANG





Penyerahan SK Dirjen Imigrasi tentang penetapan Terminal Khusus PT Badak NGL sebagai TPI.

Pelabuhan Badak LNG Ditetapkan Jadi Tempat Pemeriksaan Imigrasi

BONTANG – Sejak Bulan Juni 2023 lalu, Pelabuhan PT Badak NGL atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Pertamina Bontang telah ditetapkan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) berdasarkan SK Dirjen Imigrasi.

Hal itu disampaikan Presiden Director & CEO Badak LNG, Dema Iriandus Pahalawan saat kegiatan penyerahan SK Dirjen Imigrasi tentang penetapan Terminal Khusus PT BADAK NGL Bontang Kalimantan Timur sebagai Tempat Pemeriksaan Keimigrasian di Mainhall Town Center, PT Badak NGL Bontang, beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, ini merupakan wujud komitmen PT Badak NGL di dalam pemenuhan peraturan pemerintah, dalam hal ini tentang tata cara pemeriksaan masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Hal ini sangat relevan karena sebagai perusahaan kelas dunia, pelabuhan PT Badak NGL secara rutin didatangi kapal-kapal pengangkut LNG yang berbendera dan berawak warga negara asing. Oleh karenanya penetapan TPI ini sejalan dengan komitmen aspek keselamatan dan keamanan, serta peningkatan dalam manajemen risiko terkait pengelolaan keamanan melalui standar tata cara pemeriksaan, pengumpulan informasi dan data, penerbitan izin masuk atau keluar wilayah, pencegahan potensi ancaman keamanan, dan melindungi masyarakat dari terorisme, atau kegiatan ilegal lainnya.

"Saya berharap, komitmen terhadap peraturan, manajemen risiko yangbaik,dan hubungan yang eratantara perusahaan dan instansi pemerintah ini dapat menciptakan sinergi, memperlancar dan mengembangkan bisnis PT Badak NGL, memberikan kepuasan pelanggan, dan memberikan devisa untuk negara Republik Indonesia," ujar Dema mengutip dari situs Polresbontang.com.

Sementara itu, Kepala Kantor Imi-

grasi Kelas I TPI Samarinda, Washington Saut Dompak mengatakan, hal ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kerjasama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta PT Badak NGL, sebagai perusahaan yang telah lama beroperasi di Wilayah Bontang Kaltim.

Terminal khusus yang akan diberikan kepada PT Badak NGL akan menjadi sarana yang strategis dalam memperlancar pemeriksaan keimigrasian, sehingga sebagai proses administratif terkait keimigrasian dapat berjalan dengan lebih efisien.

"Mewakili kepala kantor wilayah, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam mewujudkan acara ini, sehingga penyerahan Surat Keputusan Terminal Khusus ini dapat terlaksana dengan sukses," ucap Washington. (*)



BONTANG



SYAKURAH/RADARBONTANG

Kegiatan pelantikan LK3.

Pengurus LK3 Dilantik, Mabe: Perpanjangan Tangan Dinsos Layani Masyarakat

BONTANG - Pelantikan pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dilaksanakan Rabu (26/7/23) di Ruang pertemuan Dispopar.

Wali Kota Bontang, Basri Rase mengungkapkan, penanganan masalah psikososial yang terjadi belakangan ini di Bontang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Perlu dilakukan secara bersama-sama dengan semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha-industri.

"Melalui tanggung jawab sosial lingkungan, pelaku usaha kesejahteraan dan potensi sumber kesejahteraan sosial, kita dapat menangani keluarga bermasalah psikososial di Bontang," jelasnya

Harapannya dalam kegiatan ini, dapat memperkuat peran serta potensi sumber kesejahteraan sosial, kepedulian, peran serta, tanggung jawab sosial lingkungan, memperkuat dan mengembangkan sistem jaringan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha-industri dalam penanganan keluarga bermasalah psikososial oleh LK3 di Bontang yang berkelanjutan.

"Saya ingin menekankan, bahwa LK3 merupakan salah satu lembaga yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang strategis. Merupakan program nasional di bawah Kementerian Sosial RI. LK3 diharapkan dapat menjadi wahana pelayanan kesejahteraan sosial, terutama bagi keluarga bermasalah psikososial," lanjutnya.

la juga berharap LK3 tidak hanya menjalankan tugasnya saja, tetapi jugamenjadi contoh bagi masyarakat untuk penerapan psikososial.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial, Bahtiar Mabe menjelaskan, LK3 merupakan mitra dari Dinas Sosial untuk konsultasi kesejahteraan keluarga, dan salah satu perpan-

jangan tangan untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat.

"Kami memang menangani masalah yang ada di masyarakat, tapi kalau semua kami tangani juga akan kurang efektif. Jadi dengan adanya LK3 ini sangat membantu kami," beber Mabe.

Sebanyak 70 kandidat dilantik pada acara tersebut. Anggota LK3 diambil dari 15 kelurahan di Bontang, seperti bhabinkamtibmas, babinsa, tenaga profesi medis, tenaga profesi psikolog, dan ada juga dari program keluarga harapan (PKH). (sya)





BERAU



Kepala Dishub Berau, Andi Marawangeng.

Pembangunan Pelabuhan Teluk Sulaiman Butuh Rp 25 Miliar Lagi

TANJUNG REDEB - Pembangunan Pelabuhan Teluk Sulaiman di Kecamatan Bidukbiduk masih membutuhkan anggaran sekitar Rp 25 miliar lagi. Padahal pelabuhan tersebut telah dibangun sejak 2020 lalu.

Kepala Dinas Perhubungan Berau, Andi Marawangeng menjelaskan, sejak dua tahun terakhir pihaknya telah mengusulkan tambahan anggaran kepada Pemprov Kaltim. Sayangnya hingga saat ini belum disetujui. "Mereka mungkin belum prioritaskan Berau," ucapnya, Kemarin (25/7/2023).

Pihaknya akan mencoba mengusulkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni 2024 mendatang. Adapun yang dibutuhkan yakni, lanjutan pembangunan

berupa jalan atau akses pendekat dari darat ke pelabuhan.

"Membutuhkan anggaran sekitar Rp 25 miliar lagi sampai tuntas. Semoga tahun depan depan disetujui agar segera beroperasi," tuturnya.

Sejauh ini, yang sudah terbangun yakni jetty atau dermaganya. Tinggal menbangun trestel untuk tempat bersandar kapal-kapal nantinya. Pada sisi darat sendiri, sudah terbangun lokasi parkir, dan area perkantoran hingga lokasi untuk pedagang.

"Tapi belum dimanfaatkan secara resmi karena masih dalam konstruksi dan belum bisa kita pakai untuk bersandar karena belum ada trestelnya," ujarnya.

"Demi keselamatan kami belum buka secara resmi, tapi kalau untuk parkir dalam menyambut kegiatan wisata sudah bisa dan untuk jualan juga sudah bisa," tambahnya.

Ke depan selain untuk pelabu-

han wisata, di Teluk Sulaiman juga akan dimanfaatkan sebagai bongkar muat. Yang saat ini juga belum bisa dimanfaatkan lantaran pembangunannya belum selesai.

Bahkan, dibeberkannya sudah ada pihak ketiga pengguna pelayaran yang ingin menyandarkan kapalnya di Pelabuhan Teluk Sulaiman tersebut.

Rencananya akan ada tiga kali penyeberangan dari Bidukbiduk menuju Palu dalam sehari. Namun, saat ini belum bisa difungsikan. Sehingga, sementara kapal-kapal yang ada bersandar di pelabuhan yang dikelola Dishub Berau di Mangkuduan.

"Anggaran pembangunan selama ini dari provinsi dan APBD Berau, kita harap nantinya bisa berfungsi secara maksimal," pungkasnya. (mnz)



Wabup Gamalis Sambut Kedatangan Tim Perpustakaan Nasional

TANJUNG REDEB - Wakil Bupati Berau, Gamalis, didampingi Asisten III Setkab Berau, Maulidiyah, menyambut kedatangan tim Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, di Terminal VIP Bandar Udara Kalimarau, Rabu (26/7/2023). Di Bumi Batiwakkal, tim akan melakukan peninjauan lapangan atau visitasi ke Perpustakaan SMA Negeri 6 Berau di Kampung Labanan Makmur Kecamatan Teluk Bayur, yang telah ditetapkan masuk lima besar lomba perpustakaan tingkat nasional tahun 2023.

Penyambutan diawali dengan tepung tawar, tradisi khas masyarakat Berau menyambut tamu. Tarian selamat datang turut menyambut kehadiran rombongan di Kabupaten Berau.

Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berau, Ali Sadikin Atma, yang turut menyambut rombongan mengatakan, Perpustakaan SMA Negeri satu satunya dari Pulau Kalimantan Timur yang masuk dalam lima besar nasional klaster III Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Berau akan bersaing dengan sekolah dari Kalimantan Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tenggara. Sebelumnya perpustakaan ini telah meraih juara pertama ditingkat provinsi sehingga menjadi wakil Bumi Etam di tingkat nasional dan telah melalui tahapan penilaian administrasi hingga dinyatakan masuk dalam lima besar. "Tim datang datang ini adalah juri yang melakukan visitasi langsung di lapangan," ungkapnya.

Wabup Gamalis, mengucapkan selamat datang kepada jajaran Tim Perpustakaan Nasional RI bersama Tim dari Dispusip Provinsi Kaltim. Hadir tim nasional disampaikan Gamalis menjadi kebanggaan bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Berau. Terlebih kehadiran ini dalam rangka penilaian lapangan terhadap salah satu perpustakaan sekolah yang ada di Bumi Batiwakka. "Selamat datang di Kabupaten Berau, Bumi Batiwakkal. Tentu ini menjadi kebanggaan kami," ungkapnya.

Mantan anggota DPRD Kaltim ini secara khusus juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran SMA Negeri 6 yang telah berhasil menciptakan perpustakaan terbaik sehingga bisa bersaing secara nasional. Begitu juga dengan Dispusip Berau yang telah serius memberikan pendampingan kepada perpustakaan sekolah bersama para mitra, salah satunya asosisasi tenaga perpustakaan sekolah Indonesia (Atpusi) Kabupaten Berau. Sehingga setiap tahun perpustakaan sekolah di Kabupaten Berau terus menorehkan prestasi terbaik. "Ini tentu menjadi kebangaan bagi kita semua, pemerintah dan masyarakat Bumi Batiwakkal," pungkasnya. (RN/Prokopim/dez)



Bupati Berau Sri Juniarsih melantik dan mengambil sumpah sebanyak 519 PPPK nakes di lingkungan Pemkab Berau.

519 PPPK Nakes Dilantik, Bupati Berau Minta Beri Pelayanan Maksimal

TANJUNG REDEB - Sebanyak 519 tenaga kesehatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dilantik dan mengambil sumpah oleh Bupati Berau Sri Juniarsih di RPJPD Bapelitbang, Rabu (26/7/2023).

Sri meminta kepada para PPPK yang baru saja dilantik untuk meningkatkan kinerja sebagai bahan pertimbangan atasan untuk mempertahankan mereka. Serta penting juga menjaga sikap dan perilaku yang mencerminkan seorang abdi negara. Ia juga mengajak untuk senantiasa menyukseskan visi, misi, dan 18 program prioritas

Pemkab Berau.

"Mari kita tumbuhkan atmosfer kerja yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat," kata Sri, Rabu (26/7/2023).

Sistematika kerja PPPK memang diatur sedemikian rigid demi memastikan pemaksimalan tugas pokok dan fungsi PPPK yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan daerah. Apalagi kesehatan menjadi esensi penting dalam membangun daerah.

"Saya harap para nakes dapat memberikankontribusi terbaik pada instansi keria masing-masing dengan meningkatkan kualitas kinerja, dan memberikan pelayanan tanpa mempersulit, apalagi memandang suku maupun status sosial masyarakat," tegasnya.

Saat ini diakuinya Pemkab Berau masih terus mengkaji dan akan berupaya semaksimal mungkin merumuskan kebijakan terbaik, berkaitan dengan mekanisme pengaturan ASN di Kabupaten Berau. Keberadaan tenaga honorer masih sangat diperlukan dalam proses tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

"Saya harap semua ASN di Kabupaten Berau dapat memberikan kontribusi terbaiknya terhadap pemerintah daerah," pintanya. (mnz/dez)



ISTIMEWA

Layanan cuci darah di RSUD Abdul Rivai Berau belum ditanggung BPJS Kesehatan.

Layanan Cuci Darah di RSUD dr Abdul Rivai Berau Belum Ditanggung BPJS Kesehatan

TANJUNG REDEB - Saat ini pasien gagal ginjal tak perlu lagi berangkat ke luar daerah untuk menjalani hemodialisis. Pasalnya, RSUD dr Abdul Rivai Berau kini telah memiliki alat cuci darah.

Direktur RSUD dr Abdul Rivai, Jusram mengatakan, layanan cuci darah sudah dibuka sejak beberapa hari lalu. Akan tetapi pelayanan baru bisa diberikan kepada pasien mandiri, sebab belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

"Nanti tim BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan akan melakukan visitasi terlebih dahulu untuk menilai operasional dari unit HD yang ada. Memang umumnya seperti itu kalau di awal operasional HD," terangnya, Rabu (26/7/2023).

Diakuinya, Jumat (21/7/2023) lalu sudah mengonfirmasi ke BPJS Kesehatan. Setelah sebelumnya, juga telah bersurat untuk pemberitahuan layanan baru.

Dia membeberkan, beberapa hari lalu pihaknya sudah mengkonfirmasi ke BPJS Kesehatan. Setelah sebelumnya sudah melayangkan surat untuk pemberitahuan layanan baru. "Semoga saja, segera terbit kerjasamanya," harapnya.

Lanjutnya, saat ini alat yang beroperasi ada 4 unit. Sambil menunggu kerja sama dengan BPJS Kesehatan. "Rencananya, nanti ada 12

mesin yang akan diatur operasionalnya sesuai ketentuan Pernefri," imbuhnya.

Jusram menjelaskan, seorang pasien gagal ginjal yang menjalani Hemodialisis, disarankan minimal 2 kali seminggu. "Untuk sekali hemodialisis memakan waktu 5 jam. Pasien akan merasa enjoy dan santai, karena sambil istirahat, makan ataupun nonton," katanya.

Mengenai harga, disebutkan Jusram, biaya yang harus ditanggung oleh pasien, untuk melakukan cuci darah, yakni diangka Rp 850 hingga Rp 1 juta per sekali terapi. "Harganya berkisar diangka itu," tandasnya. (dez)



Kabupaten Berau terpilih menjadi tuan rumah pelaksanaan JPD Kaltim tahun 2023, di halaman Kantor Dispora Berau.

Berau Jadi Tuan Rumah JPD Kaltim

TANJUNG REDEB - Kabupaten Berau menjadi tuan rumah Jambore Pemuda Daerah (JPD) se-Kalimantan Timur tahun 2023 yang diselenggarakan di Halaman Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Berau sejak 26-29 Juli 2023.

Diikuti ratusan pemuda pemudi dari enam kabupaten/kota se-Kaltim. Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Kaltim Isran Noor yang wakili Bupati Berau Sri Juniarsih.

Para pemuda berkumpul menjadi satu untuk mengikuti berbagai kegiatan. Mulai dari perkemahan, pameran, diskusi program kepemudaan, pentas seni, lomba senam hingga kunjungan wisata ke Pulau Derawan.

Membacakan sambutan Gubernur Kaltim, Bupati Berau Sri Juniarsih menyambut baik terselenggaranya JPD se-Kaltim tersebut. Adapun tema tahun ini yakni, meningkatkan kemandirian dan daya saing pemuda.

"Saya bangga melihat antusias dan semangat generasi muda Kaltim yang berkumpul di acara ini. Melalui JPD ini kita rangkul potensi luar biasa yang dimiliki generasi muda kita," ungkapnya, Rabu (26/7/2023).

Pemprov Kaltim memberi apresiasi tinggi atas digelarnya JPD untuk memperkuat keberagaman anak bangsa di Kaltim. Dalam memperkokoh nasionalisme yang religius dan meningkatkan kreatifitas serta daya saing.

"Jambore ini dijadikan momentum pengetahuan, keterampilan dan mempererat para pemuda antar kabupaten kota se-Kaltim. Karena para peserta JPD ini merupakan agen perubahan bagi daerahnya masing-masing. Maka perlu kualitas diri yang baik untuk mengenalkan kultur yang ada," jelasnya.

"Saya harap agar seluruh peserta menjadi lebih disiplin, kreatif dan inovatif dan memiliki pengetahuan dan keterampilan wawasan luas yang dapat diberdayakan untuk mendukung pembangunan negara yang lebih baik," harapnya.

Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kaltim, Ahmad Bahri menyebut, ada enam kabupaten/kota saja yang mengikuti JPD tahun ini. Yakni, Samarinda, Balikpapan, Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara dan Berau.

Yang mana tujuan diselenggarakannya JPD ini yakni, meningkatkan semangat nasionalisme, persatuan dan kesatuan. Meningkatkan nilai budaya bangsa menuju kemandirian pemuda. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya pemuda. "Serta menumbuhkan sumber daya teknologi dan sumber potensi daerah menuju kemandirina. Juga menjadi tempat pembelajaran bagi pemuda untuk pengembangan diri," terangnya.

Sementara, sumber anggaran pelaksanaan JPD tahun ini dari Dispora Kaltim dan Dispora Berau.

Deputi Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Kemenpora, Dwi Agus Susilo menyampaikan, melalui jambore para pemuda akan bertemu dan bersilaturahmi menunjukkan kapasitas dirinya yang nantinya akan berkolaborasi.

"Sebab kekuatan kolaborasi sangat dibutuhkan. Tidak hanya membangun kabupaten/kota-nya atau Kaltim saja, tapi juga menbangun Indonesia. Dan itu ada ditangan pemuda hari ini," paparnya.

Pihaknya mengarahkan tiga hal dalam jambore tersebut, meliputi, menumbuhkembangkan budaya pop, meningkatkan kewirausahaan dan meningkatkan kesukarelawanan.

"Terus dukung semua kegiatan pemuda. Kita harap kekayaaan alam di Kaltim khususnya di Berau dapat dinikmati seluruh masyarakat dan pemuda dapat ikut terlibat keseluruhan aktivitas usaha, pendidikan dan sosial," tandasnya. (mnz/dez)



BALIKPAPAN



Pelaku penggelapan kendaraan sepeda motor AMR (44) saat digiring petugas ke sel tahanan Makopolsek Balikpapan Utara.

Modus Beli Motor dan Bawa Kabur, Pasutri Diringkus Polsek Balikpapan Utara

BALIKPAPAN - Pasangan suami istri (Pasutri) berinisial AMR (44) dan AS (35) diamankan jajaran Opsnal Polsek Balikpapan Utara karena telah melakukan aksi tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang dilakukan pada Kamis (29/6/2023) lalu sekitar pukul 11.00 WITA.

Kapolsek Balikpapan Utara, AKP Bitab Riyani mengatakan, adapun modus yang digunakan pelaku adalah dengan mengajak bertemu penjual sepeda motor dan mencobanya. Namun, saat dicoba oleh pasutri tersebut dibawa kabur.

"Janjian sama yang jual. Nah

pas dicoba, tes drive lah istilahnya motor ini langsung dibawa kabur dan nggak kembali," ujarnya, Rabu (26/7/2023).

Lebih lanjut Bitab Riyani menjelaskan, merasa keberatan korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke Makopolsek Balikpapan Utara. Namun rupanya kejadian ini bukan sekali, melainkan sudah dua kali di Utara, dua kali di Barat, dan dua di Polresta Balikpapan.

"Kalau di Utara ini dia melakukan dua kali di Somber dan Batu Ampar. Tapi ada juga LP (Laporan Polisi) di Polres dua dan Barat dua," jelasnya.

Dikatakan Kapolsek Balikpapan

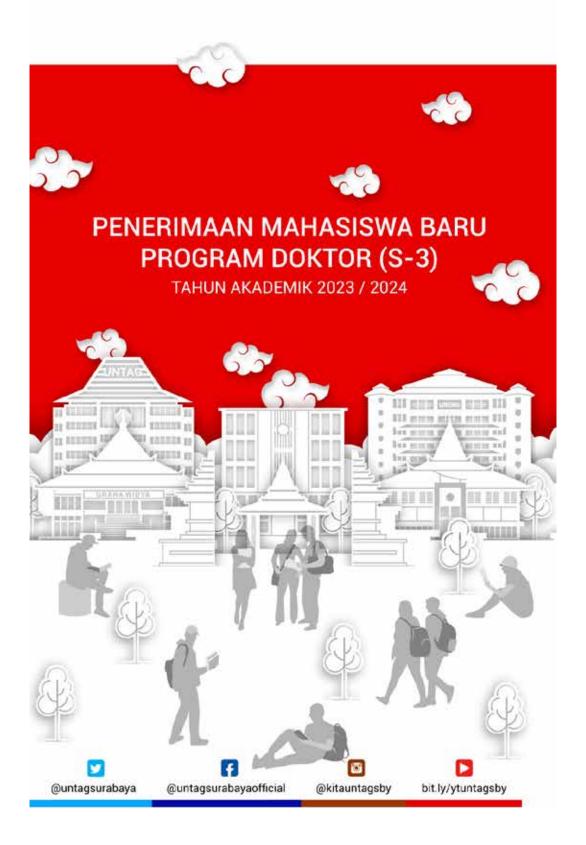
Utara, motor hasil kejahatan tersebut dijual oleh pelaku seharga Rp 1,5 juta. "Dia jual di sosmed. Pas nangkap juga korban liat di sosmed dan lapor ke kita. Jadi kita ajak ketemuan dan langsung amankan," tambahnya.

Seperti diketahui, pasangan pasutri ini juga merupakan residivis atas kasus narkoba. Atas perbuatannya, keduanya pun disangkakan dengan Pasal 378 Subs 372 KUHPidana. "Ancamannya 5 tahun penjara," tutup Kapolsek Balikpapan Utara. (bom)



KAMIS 27 JULI 2023









PROGRAM STUDI

DOKTOR ILMU ADMINISTRASI (Akreditasi B)

DOKTOR ILMU EKONOMI (Akreditasi B)

DOKTOR ILMU HUKUM (Akreditasi B)

BIAYA PENDIDIKAN

RINCIAN & TAHAPAN	SMT GASAL	SMT GENAP	PEMBAYARAN	
▶ DPP			Rp.	10.000.000
Uang Kuliah Termin - I	Agustus	Februari	Rp.	7.500.000
Uang Kuliah Termin - II	November	Mei	Rp.	9.500.000
Uang Kuliah Termin - III	Februari	Agustus	Rp.	9.500.000
Uang Kuliah Termin - IV	Mei	November	Rp.	9.500.000
Uang Kuliah Termin - V	Agustus	Februari	Rp.	9.500.000
Uang Kuliah Termin - VI	November	Mei	Rp.	9.500.000
		TOTAL	Rp. 65.000.000	

Catatan:

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 150.000

DPP DAPAT DIANGSUR, ANGSURAN PERTAMA SEBESAR 50%, SISANYA DIANGSUR SEBANYAK 5X DAN HARUS LUNAS PALING LAMBAT PADA PEMBAYARAN TERMIN-VI

▶ FORMULIR PENDAFTARAN
 ▶ BIAYA KTM RFID
 ▶ BIAYA HER-REGISTRASI PER-SEMESTER dibayar setiap awal semester (Agustus & Februari)

▶ BIAYA UJIAN PERBAIKAN : Rp. 150.000 (per Mata Kuliah)

BIAYA DISERTASI diatur kemudian dalam keputusan Pengurus Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya



PERSYARATAN

- ▶ Scan Ijazah S-1 dan S-2 Asli
- Scan Transkrip Nilai S-1 dan S-2 Asli
- Scan Rancangan Usulan Penelitian (maksimal 25 halaman)
- Scan KTP, KK & Akta Kelahiran Asli

Dokumen discan dalam format pdf/jpg, dan persyaratan asli dibawa pada saat melakukan daftar ulang

PENDAFTARAN

GELOMBANG - I 1 OKT. 2022 - 31 MARET 2023

GELOMBANG - II
1 APRIL - 30 JUNI 2023

GELOMBANG - III
1 JULI - 31 AGUSTUS 2023

TEMPAT PENDAFTARAN:

Graha Widya Lantai 1, Kampus UNTAG, Jl. Semolowaru 45 Surabaya

JADWAL LAYANAN:

Senin-Jumat, Pukul 08.00-14.00 WIB

HOTLINE PROGRAM 5-2 & 5-3 0813 5748 7129

HOTLINE PROGRAM D-3 & S-1 0811 300 1716

JOIN GROUP TELEGRAM

@pmbuntagsby2023

REKENING TUJUAN

UNTUK PEMBELIAN FORMULIR DAN PEMBAYARAN DAFTAR ULANG

- Program D3 & S1 Pembayaran melalui Teller Bank Jatim atau Transfer ke: No. Rek. 0741002183 (Bank Jatim)
- Program S2 & S3 Pembayaran ke: No. Rek. 7917081945 (Bank BNI)

Rekening a.n. Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya





ALUR PENDAFTARAN

MULAI PENDAFTARAN

Akses pmb.untag-sby.ac.id

Selanjutnya: - Klik Tombol Daftar

- Isi data pendaftar
- Klik Simpan

FORMULIR PENDAFTARAN

Pembelian formulir pendaftaran melalui Bank (Rekening tujuan dapat dilihat pada keterangan di bawah)

MELENGKAPI DATA DIRI

Lengkapi data diri di : pmb.untag-sby.ac.id (gunakan nomor token untuk log in)

VALIDASI PEMBELIAN FORMULIR

- Pendaftar melakukan validasi untuk mendapatkan Nomor Token
- Unggah (upload) bukti pembayaran di vpt1.untag-sby.ac.id

TES MASUK

- Pendaftar Program D3 & S1
 Tes Online
- Pendaftar Program S2 & S3 Tes menghubungi No. Telp / Whatsapp 0811 300 1716 atau 0813 3000 2758

PENERBITAN SKD

Pendaftar menerima SKD (Surat Keterangan Diterima)

VALIDASI DAFTAR ULANG

Unggah atau Upload SKD dan Bukti Pembayaran Daftar Ulang di pmb.untag-sby.ac.id

DAFTAR ULANG

Lakukan pembayaran sesual dengan jumlah yang tertera di SKD melalui Bank (Rekening tujuan dapat dilihat pada keterangan di bawah)

SURAT PERNYATAAN & TATA TERTIB

Unduh atau *Download*Surat Pernyataan dan Tata
Tertib Calon Mahasiswa,
ditanda-tangani dan bermaterai.
Selanjutnya, Unggah atau *Upload*di : *pmb.untag-sby.ac.id*

KTM & JAS ALMAMATER

KTM dan Jas Almamater diambil di tempat Pendaftaran Mahasiswa Baru (Graha Widya Lt.1)

*) Waktu akan diinfokan lebih lanjut

SELES

Pendaftar secara resmi menjadi Mahasiswa Untag Surabaya











KUTAI TIMUR





Kutim Komitmen Penuh dalam Pencegahan Antikorupsi

SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi membuka secara resmi kegiatan Momentum Pemantauan, Evaluasi dan Verifikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) pada Pemerintah Provinsi Kaltim dan Kabupaten/Kota seKaltim Semester I Tahun 2023 dan Pengukuhan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Provinsi Kaltim periode 2023-2025 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (25/7/2023) kemarin.

Acara yang turut dihadiri Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutai Timur (Kutim) Rizali Hadi tersebut juga dirangkai dengan agenda penandatanganan dukungan komitmen di masing-masing daerah dalam pencegahan antikorupsi.

Dari siaran pers yang diterima Radar Kutim, Seskab Kutim Rizali Hadi menegaskan sesuai arahan dari Wagub Kaltim bahwa momen ini diharapkan dapat memotivasi seluruh pihak untuk semangat bekerja keras melakukan pencegahan tindakan korupsi di Benua Etam dan khususnya Kutim.

"Jadi upaya ini sangat penting dilakukan, agar Pemerintah Daerah melalui instansi terkait dalam hal ini Inspektorat Daerah bekerja maksimal melakukan pembinaan terhadap seluruh OPD, sehingga pencegahan tindak korupsi dapat dilakukan. Dan, pegawai di lingkungan pemerintahan di tingkat kabupaten jauh dari kasus korupsi," ungkap Rizali yang dalam kegiatan ini turut didampingi Inspektur Inspektorat Wilayah (Itwil) Kutim Muhammad Hamdan dan Kepala BPKAD Kutim Teddy Febrian.

Ditambahkan Rizali, kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor 64, Nomor 700.1.2.4/562/IJ dan Nomor HK.02/PRJ-5/D3/01/2023 Tanggal 21 Maret 2023 tentang Pengelolaan Bersama Monitoring Center for Prevention (MCP).

"Karena itu, Pemkab Kutim bersyukur Tim KPK selalu datang melakukan pembinaan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-Kaltim. Sehingga, aparatur pemerintah daerah bisa berintegritas dalam upaya pence-

gahan tindak korupsi. Intinya, Kutim siap menjalankan arahan ini. Semoga kerja sama ini terus dibangun, sehingga Pemerintah Daerah di seluruh Kaltim semangat bekerja dan berkolaborasi," tegasnya.

Sementara itu, Wagub Kaltim Hadi Mulyadi berpesan kepada 17 PAKSI Provinsi Kaltim yang baru saja dilantik, diharapkan ke depan bertambah terus jumlahnya, sehingga mampu melakukan pembinaan di seluruh wilayah.

"Selamat kepada penyuluh yang baru dikukuhkan. Tidak hanya aparatur pemerintah maupun di lingkungan Inspektorat atau Bagian Keuangan atau perpajakan, tetapi wartawan bahkan masyarakat juga bisa menjadi anggota penyuluh," jelasnya.

Untuk diketahui dalam kegiatan ini turut hadir, Plh Inspektur III Kemendagri RI Kusna Heriman dan sejumlah Tim Asistensi dan Verifikasi MCP Kemendagri RI untuk Wilayah Provinsi Kaltim, Kepala Inspektorat Wilayah Kaltim Dr HM Irfan Prananta dan sejumlah Sekda Kabupaten/Kota se-Kaltim.(rkt1)



Penambalan jalan berlubang di beberapa titik Kecamatan Tanah Grogot.

Tambal Jalan Berlubang, Pemkab Paser Alokasikan Rp 1,3 M

PASER - Jalan berlubang di sekitaran Kecamatan Tanag Grogot sangat memprihatinkan. Karenanya, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser mengalokasikan anggaran dari APBD 2023 sebesar Rp 1,3 miliar untuk perbaikan jalan tersebut.

Sebelumnya, di 2022 lalu, perbaikan ruas jalan yang rusak dilakukan dengan overlay atau lapisan tambahan. Pekerjaannya melalui overlay, dikerjakan dengan pagu Rp 4,8 miliar.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUPR) Kabupaten Paser, Asnawi mengatakan, penambalan jalan itu terpusat di 3 titik, khususnya persimpangan yang ada dipusat Kecamatan Tanah Grogot. "Letaknya di Jalan Jendral Sudirman persimpangan Polres Paser dan simpangan SPBU, serta disepanjang Jalan RA Kartini. Itu yang cukup parah lubangnya," kata Asnawi, Sabtu (22/7/2023).

Berdasarkan pantauan. Progres pengerjaan seperti di 2 tirik persimpangan Jalan Jendral Sudirman sudah selesai. Prosesnya dilakukan menggunakan beton atau rigid pavement lalu dilapisi aspal.

"Pengerjaannya sudah berjalan sejak seminggu yang lalu, kemungkinan tiga sampai emat hari kedepan sudah diaspal," ujarnya.

Asnawi menyebut, pengerjaan tambal jalan diperkirakan rampung dalam sebulanan. Meski demikian, perbaikan itu belum menutupi sepenuhnya jalan berlubang di Kecamatan Tanah Grogot, salah satu contohnya di Jalan Panglima Sentik.

Dengan begitu, Asnawi menambahkan, akan mengakomodir kebutuhan perbaikan jalan rusak lainnya di APBD Perubahan Kabupaten Paser 2023. Adapun nilai anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 2 miliar.

"Untuk anggaran perubahan APBD 2023 direncanakan di jalan panglima sentik dan ditambah beberapa titik lainnya lagi. kemungkinan dianggarkan sekitar Rp 2 miliar untuk tambal jalan," ucapnya.

Diketahui, sejak 2022 penambalan jalan berlubang di 2022 sudah diperbaiki di 7 ruas jalan. Antara lain Jalan Yos Sudarso 161 meter, HOS Cokro Aminoto 663,7 meter, Jenderal Ahmad Yani 550 meter, D.I Panjaitan 82 meter. (bs)



TB MEDIA KALTIM

Penanaman pohon mangrove oleh KPM Kabupaten Paser.

KPM Tanam 300 Bibit Bakau, Libatkan DLH Paser Atasi Kerusakan Hutan di Pesisir Desa Modang

PASER - Komunitas Peduli Mangrove (KPM) Kabupaten Paser menanam 300 pohon bakau, dalam rangka memperingati Hari Mangrove Internasional, di Desa Modang, Kecamatan Kuaro, Rabu (26/72023).

Kegiatan ini melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Paser, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser, serta puluhan pelajar yang berlangsung di Persemaian Mangrove Komunitas Peduli Mangrove.

Ketua KPM Kabupaten Paser, Abdul Azis mengatakan, mangrove merupakan tumbuhan yang keberadaannya sangat penting dalam ekosistem lingkungan. "Karena hutan mangrove memiliki banyak fungsi bagi kehidupan, baik dari segi fisik, biologi, dan ekonomi," terangnya.

Banyaknya alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak, membuat pihaknya tergerak untuk mengembangkan pohon mangrove. "Jadi kami perjuangkan di Modang ini tidak ada lagi kegiatan jual beli lahan mangrove," terang Azis.

la menilai, mangrove merupakan hak komunal yang perlu dilestarikan bersama sehingga perlu adanya dukungan dari berbagai pihak. Penanaman pohon bakau yang dilakukan hari ini, kata Azis merupakan langkah awal dalam melestarikan hutan mangrove.

"Jadi siapa saja yang ingin terlibat baik itu warga maupun lainnya, kami membuka diri. Apalagi bibit mangrove yang tersedia saat ini sekitar 25 ribu pohon, tidak hanya di tanam di Desa Modang melainkan pada wilayah lainnya juga," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Hutan Tropis (YHT) Earthworm Foundation Kaltim, Bahrun mengatakan, dalam 10 tahun terakhir di Indonesia mengalami kerusakan hutan mangrove. Salah satunya di Provinsi Kaltim.

"Kondisi tersebut sangat memprihatinkan, karena kurangnya kesadaran masyarakat pesisir mengenai fungsi hutan mangrove menjadi salah satu penyebabnya," terangnya.

Hal tersebut dapat dibuktikan dari kerusakan hutan mangrove di sekitar Teluk Adang dan sekitarnya, yang pada umumnya disebabkan penebangan dan alih fungsi lahan menjadi tambak, juga penambangan batubara.

Terkhusus untuk Desa Modang, kawasan hutan mangrove masih relatif baik. Sehingga perlu diupayakan menjaga kelestarian juga rehabilitasi kawasan terbuka. "Sudah seharusnya berperan aktif dalam memperbaiki kerusakan hutan mangrove dengan cara penanaman kembali," ujarnya.

Selain itu, Komunitas Peduli mangrove Kabupaten Paser diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hutan mangrove. Serta membantu melindungi hutan mangrove, dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder lainnya.

"Salah satunya dengan melaksanakan penanaman pohon mangrove di kawasan mangrove Desa Modang," ungkap Bahrun.

Giat yang dilaksanakan ini, bertujuan merehabilitasi area lahan terbuka di hutan Mangrove Desa Modang dan sekitarnya. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ekosistem mangrove serta bagaimana cara melestarikan mangrove.

"Harapan kita ke depan semoga bisa lebih maju, dan program-program konservasi bisa dilakukan di sini dengan harapan pemerintah daerah juga bisa mensupport," tutupnya. (bs)



TB/MEDIA KALTIM

Stadion Sadurengas

Pemkab Paser Butuh Rp 50 Miliar untuk Revitalisasi Venue Porprov 2026

PASER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser membutuhkan anggaran berkisar Rp 40 hingga Rp 50 miliar untuk perbaikan dan pembangunan venue olahraga, jelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke VIII Kalimantan Timur (Kaltim) di Kabupaten Paser pada 2026 mendatang.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Paser, Muksin menyatakan, kebutuhan anggaran itu berdasarkan estimasi yang sudah dilakukan oleh pihaknya, untuk dapat memenuhi fasilitas infrastruktur olahraga di Kabupaten Paser.

Kendati begitu, Muksin mengamini tidak dapat sepenuhnya kebutuhan anggaran tersebut dialokasikan oleh Pemkab Paser. Sehingga, pihaknya juga mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk membantu memenuhi kebutuhan venue olahraga.

"Karena keterbatasan anggaran

tentu kami minta juga provinsi kan. Karena ini kegiatan provinsi, jadi kami minta juga untuk berpartisipasi," kata Muksin, saat dihubungi, Rabu (26/7/2023).

Muksin menginginkan, agar perbaikan dan pembangunan venue olahraga, khususnya yang digunakan nanti, dapat dilakukan secara bertahap. Hal ini turut sesuai dengan komitmen Bupati Paser, Fahmi Fadli, untuk memfasilitasi kebutuhan olahraga di Kabupaten Paser.

Hingga kini, beberapa venue olahraga tengah dibangun dan diperbaiki. Seperti pembangunangedung tennis meja dan perbaikan fasilitas di Stadion Sadurengas. Kedepan, akan dilakukan pengerukan waduk di Kawasan Gentung Temiang.

"Kalau di stadion, lintasan lari nanti kita mantapkan. Jadi alas lintasannya itu kita pasang berbahan karet," tambahnya.

Meski demikian, Muksin menga-

kui tidak semua cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan pada Porprov nanti memiliki venue di Kabupaten Paser. Seperti cabor tembak yang dipastikan terlaksana di Kota Balikpapan dan cabor senam di Kota Samarinda.

"Untuk cabor yang butuh penanganan cukup kompleks kita tidak dapat laksanakan di Paser. Jadi bisa saja dialihkan ke daerah lain sehingga tetap terlaksana," ucapnya.

Namun begitu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov Kaltim dan Panitia Besar (PB) Porprov ke VIII. Menurutnya, sekira venue dengan kebutuhan dan fasilitas yang kompleks dapat disediakan, dipastikan dapat terlaksana di Kabupaten Paser.

"Kita serahkan nanti ke provinsi. Kalau bisa disediakan semua di Paser, berarti bisa dilaksanakan di sini semua," pungkasnya. (bs)



PENAJAM PASER UTARA



DISKOMINFO PPU

Para personel BPBD PPU saat menggelar latihan fisik perdana, Rabu (26/7/2023).

Personel BPBD PPU Gelar Latihan Fisik, Persiapan Hadapi Kemungkinan Bencana

PPU - Para personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Penajam Paser Utara (PPU) melaksanakan latihan fisik, Rabu (26/07/2023). Hal ini dilakukan untuk menghadapi kemungkinan bencana akibat perubahan cuaca yang terjadi belakangan.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada periode Januari hingga Mei 2023 di Indonesia terdapat setidaknya 1.675 kejadian yang didominasi bencana hidrometeorologi, yakni sebesar 99,1 persen. Bencana-bencana itu merupakan bencana akibat aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin, dan kelembapan.

Penyebab bencana hidrometeorologi adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Bentuk bencana tersebut meliputi kekeringan, banjir, badai, karhutla, longsor, dan sebagainya.

Menyikapi itu, Kepala Pelaksana BPBD PPU Budi Santoso menyampaikan pihaknya telah melakukan berbagai koordinasi dalam persiapan menghadapi potensi itu muncul di daerah. Selain itu, kesiapan peralatan, sarana dan prasarana hingga sumber daya manusia (SDM) juga dilakukan.

Salah satunya ialah melalui kegiatan ini, dapat meningkatkan kesigapan, kekompakan diiringi dengan kesiapan stamina. Kegiatan ini juga pertama kali dilakukan ini dan akan dilaksanakan secara rutin.

"Yang pasti staminanya. Karena nanti setelah ini Kami akan melakukan pelatihan peralatan-peralatan karhutla (kebakaran hutan dan lahan)," ungkapnya.

Latihan fisik yang dilakukan berupa jalah kaki dari Kantor BPBD PPU melewati wilayah perkantoran Pemerintah Kabupaten PPU dan kembali ke kantor BPBD PPU. Budi menyebut setelah latihan ini, akan ditingkatkan intensitas dan variasi jenis pelatihan fisik. "Untuk hari ini kita jalan kaki dari home base, dari kantor sampai pemkab kemudian kembali ke kantor. Kemudian ke depan mungkin kita ada kegiatan fisik yang lain, apakah nanti sambil lari kemudian ada push up dan lain sebagainya," terang Budi.

Selain itu, para personel BPBD PPU ke depannya juga tak hanya akan meningkatkan kemampuan fisik. Namun juga ketangkasan dalam menggunakan berbagai peralatan penyelamatan.

"Jadi ini setelah fisiknya mulai terbentuk kuat, baru nanti kita latihan ketangkasan. Ketangkasan menggunakan peralatan dan kecepatan tanggap bencana," tutupnya. (sbk)



Kepala Pelaksana BPBD PPU, Budi Santoso.



PENAJAM PASER UTARA



Diskominfo PPU Rampungkan Masterplan SPBE, Implementasi 2024

PPU - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui pembuatan masterplan arsitektur dan tata kelola.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU Khairudin menyampaikan bahwa pihaknya telah merampungkan penyusunan masterplan pada tahun ini. Rencana konsep dan perencanaan itu mulai diimplementasikan pada 2024.

"Diskominfo PPU akan menyiapkan server pada tahun ini untuk mendukung terwujudnya SPBE," ujarnya Rabu (26/7/2023).

Khairudin mengungkapkan Diskominfo PPU telah mengidentifikasi aplikasi yang digunakan Pemkab PPU. Baik itu yang mengadopsi dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari daerah.

Semua akan dituangkan dalam SPBE PPU. Sehingga pelayanan publik akan terintegrasi dan menghasilkan pelayanan publik yang optimal, terbuka, dan lebih aman dibanding dengan mengelola secara mandiri oleh masing-masing perangkat daerah.

"Karena kami juga akan bekerja sama dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) terkait dengan sandinya agar data-data tidak bocor, seperti itu. Kemudian, baik itu sifatnya nanti ada informasi yang (terkait) pelayanan publik baik itu aduan dan sebagainya, itu juga kami akan muatkan di dalam SPBE itu," jelas Khairudin.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian di Diskominfo PPU Syafrudin Lamato menambahkan, SPBE tidak hanya diampu oleh dinas teknis saja. Tetapi juga Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setkab PPU sebagai leading sector.

Di samping itu, pelaksanaan SPBE ini perlu dukungan dari semua perangkat daerah agar dapat berjalan dengan baik. "Minggu lalu, baru selesai asesmen atau evaluasi mandiri untuk SPBE. Dari 47 indikator yang dinilai dalam SPBE, tidak semua (indikator penilaian) datanya ada di Diskominfo, namun tersebar juga di beberapa OPD lainnya," ungkapnya.

Lamato menyampaikan hasil evaluasi mandiri untuk SPBE PPU mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada 2022, angka evaluasi SPBE PPU berada pada 1,8. Pada tahun ini, angka yang diperoleh berkisar pada 2,6. Ia menyebut integrasi menjadi salah satu aspek penting dalam SPBE.

"Satu contoh, kita memasukkan aplikasi yang ada di RSUD, dia akan meminta layanan ini connect tidak dengan Dukcapil, connect tidak dengan Puskesmas. Jadi seperti itu, mau tidak mau memang semua harus terintegrasi," sebutnya.

Ia berharap, upaya-upaya yang telah dilakukan, salah satunya dengan adanya Masterplan Arsitektur dan Tata Kelola SPBE dapat didukung oleh Pemkab PPU melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Terlebih PPU menjadi wilayah terpilih dalam percepatan penyelenggaraan SPBE dengan adanya Ibu Kota Nusantara (IKN). "Alhamdulillah perangkat daerah lainnya support terhadap hal tersebut," pungkasnya. (sbk)



NIS/DISKOMINFOPPU

Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian di Diskominfo PPU Syafrudin Lamato.



NIS/DISKOMINFOPPU

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU Khairudin.



SAMARINDA



Koordinator Relawan Irwan Dibentuk, Siap Kawal Program Padat Karya untuk Masyarakat

SAMARINDA - Anggota Komisi V DPR RI, Irwan "Fecho", membentuk Koordinator Relawan Irwan, Selasa, (25/7/2023). Total ada 150 orang yang diberikan tugas oleh Ketua DPD Demokrat Kaltim Irwan.

Irwan menerangkan, koordinator relawan tak hanya fokus untuk pemenangan di Pemilu 2024. Ia menyebut bahwa tugas para koordinator yakni mengawal program padat karya yang bersumber dari APBN, agar dapat menyentuh apa yang dibutuhkan masyarakat.

"Mereka (koordinator relawan) turut mengawal program-progam yang diturunkan agar tersalurkan dengan tepat sasaran sampai bisa dirasakan masyarakat kita, dan mereka juga yang akan mengawasi," terang Irwan kepada media ini, Selasa malam (25/7/2023).

Irwan mengatakan, pembentukan relawan ini lebih efektif untuk menyerap aspirasi masyarakat ketimbang harus langsung turun mendapati keluhan-keluhan kebutuhan masyarakat khususnya di bidang infrastruktur.

"Saya bukan 'Superman', makanya saya ingin membentuk supertim. Para tim ini yang nantinya juga akan mengumpulkan masalah, seperti sekolah rusak, rumah rusak, pertanian yang tidak ada irigasinya serta sejumlah persoalan lainnya, kalau tunggu saya harus turun lambat," ucap Irwan.

Selanjutnya ujar Irwan, ia berencana membentuk koordinator relawan di tingkat desa. Tujuannya agar terbentuk relawan yang terstruktur dan masif hingga ke pelosok. "Kalau target koordes itu bisa sampai 1.040, saya rasa target itu bisa cukup maksimal," tegasnya.

Ketua Demokrat Kaltim ini tak luput berpesan kepada semua koordinator relawan, untuk jujur dalam bekerja, menjaga integritas, melayani masyarakat.

"Kekuasaan itu bisa menarik orang-orang jahat dan bisa merusak orang-orang baik, maka dibutuhkan kerendahan hati dalam melayani masyarakat, jangan sampai menipu," pungkasnya. (eky)





SAMARINDA





Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso saat meresmikan peluncuran Kampung Moderasi Beragama.

Wakil Wali Kota Samarinda Resmi Luncurkan Kampung Moderasi Beragama

SAMARINDA-Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi Wongso secara resmi luncurkan Kampung Moderasi Beragama tepatnya di Gang Perintis, Jalan Sultan Alimuddin, Kecamatan Samarinda Ilir pada Rabu (26/7/2023).

Diketahui Kampung Moderasi Beragama ini merupakan inisiatif yang diguguskan oleh Kementerian Agama Kota Samarinda.

Dalam sambutannya, Rusmadi Wongso mengatakan bahwa dengan diluncurkannnya Kampung Moderasi Beragama ini, maka sebagai wujud kemajuan daerah tersebut.

la pun meminta kepada seluruh warga agar terus dapat menciptakan suasana yang rukun dan tertib, serta menjunjung tinggi nilai agama dan kebudayaan antar suku.

"Terlebih hal ini berkaitan dengan program Probebaya yang bukan hanya tentang pembangunan fisik namun Sumber Daya Manusia. Sehingga, tidak harus khawatir jika ada masyarakat yang tidak mampu

atau meninggalkan rumah, karena semua saling guyub saling menjaga," ucap Rusmadi.

Dengan meluncurkan program kampungmoderasiini,Rusmadimengungkapkan bahwa sebagai salah satu syarat akan kemajuan daerah. Sebab, hal ini juga berdampak pada suasana baik keamanan juga kenyamanan dari lingkungan masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa kemajuan dari suatu bangsa berasal dari perbedaan, namun fokusnya bukan terkait pada identitas. Terlebih terkait akhirat, semua harus saling membantu. Tujuan utamanya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia.

"Hal ini sangat mendukung cita-cita Samarinda menuju Pusat Peradaban," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, Baequni mengatakan bahwa suasana dan kondisi di Gang Perintis dari sisi Toleransi agama, kedamaian dan keharmonisan sangat baik. Hal inilah yang membuat daerah tersebut terpilih menjadi Kampung Moderasi.

Baequni juga menguraikan bahwa kampung ini juga akan jadi percontohan terhadap kampung lainnya untuk dapat meningkatkan dan menjaga budaya dan nilai agama. Apalagi mengingat beragam suku dan agama yang ada di Samarinda.

"Harapannya dapat menularkan ke kampung-kampung lain di sekitarnya. Kami harus membantu untuk mempertahankan yang telah berjalan selama ini," jelas Baequni.

Dikatakan Baequni nantinya juga akan ada tim yang menjalankan program di Kampung Moderasi Beragama ini. Tujuannya agar menjaga situasi di lingkungan tersebut sesuai zaman sekarang.

"Paling penting, terkait dengan menjaga dan memelihara kerukunan dan tujuan utamanya terkait dengan kesejahteraan rakyat. Nanti akan ada tim-timnya untuk memelihara moderasi beragama yang telah berlangsung," pungkasnya. (vic)



SAMARINDA



Wagub Hadi Ajak Orangtua dan Guru Gali Potensi dan Akomodir Kecerdasan Anak

SAMARINDA – Memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 2023, Program S1 Pemerintahan Integratif (PIN) Universitas Mulawarman bersama Ikatan Pengembang Kepribadian Indonesia (IPPRISIA) Kaltim, menggelar diskusi panel di Lantai 4 Rektorat Universitas Mulawarman Samarinda, Rabu (26/7) tadi. Diskusi panel tersebut bertema, "Anak Terlindungi, Indonesia Maju".

Kegiatan ini dibuka Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi. Hadir dalam pembukaan kegiatan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unmul DR HM Noor MSi, serta Ketua Program Studi S1-PIN Budiman SIP MSI dan Ketua IPPRISIA Kaltim Marliana Wahyuningrum SE MM.

Ada 4 narasumber dihadirkan masing-masing Fasilitator Perlindungan Anak Kaltim Siti Khodijah SE MSi, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kaltim Drs H Sumadi MSi, Fasilitator Perlindungan Anak Samarinda H Sahidin Ahmad Ssos MSi, dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim sekaligus trainer IPPRISIA Kaltim, Endro S Efendi, SE CHt CT CPS CME. Diskusi panel dipandu moderator DR Insan Tajuli Nur SH MH.

Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi dalam sambutannya menyampaikan, kecerdasan setiap anak berbeda. Untuk itu, setiap orang tua harus mampu menggali potensi kecerdasan setiap anak.

"Tugas orang tua sebagai pemerintah, guru, dosen, dan tenaga pengajar, memastikan seluruh anak bisa diakomodir semua tipe kecerdasannya," sebutnya.

Dikatakan, sekolah diingatkan tidak boleh dibangun tanpa menyiapkan guru kompeten. "Termasuk sekolah menyiapkan alat musik dan alat olahraga," pesannya. Sebab tidak semua anak memiliki kecerdasan akademik. Ada kecerdasan lain yang juga perlu digali.

"Karena itu, tiap anak yang naik kelas sepatutnya diberikan penghargaan. Penghargaan sangat penting," sambungnya.

la mengajak para pendidik mem-

berikan penghargaan berdasarkan kemampuan anak. Karena kata dia, sejatinya tidak ada anak tidak pintar.

"Semua anak pintar dengan berbagai kecerdasan masing-masing. Yang bodoh adalah orang tua yang tidak bisa menemukan potensi anak atau muridnya," ulasnya.

Wagub juga mengingatkan agar orang tua tak perlu galau jika anak tidak berprestasi. "Poinnya, tidak hanya perlindungan anak dari kekerasan tapi juga melindungi potensi anak agar terfasilitasi dengan baik," tutur Hadi yang mengaku sedang menulis buku "Seni Mendidik Anak dengan 8 Sentuhan".

"Mari sentuh anak dengan hati. Cintai semua anak didik. Semua anak Indonesia harus dianggap sebagai anak karena mereka yang akan menggantikan kita. Anak akan meneruskan kebaikan orang tuanya. Pastikan mendidik anak dengan penuh cinta dan kasih sayang," bebernya.

Dalam kesempatan itu, Wagub Hadi Mulyadi juga bercerita pengalamannya menjadi guru dan dosen. Tak hanya itu, orang nomor dua di Kaltim ini juga sempat membacakan dua puisi yang disambut aplaus meriah dari seluruh peserta yang hadir. Puisi soal anak itu, dibawakan dengan penuh penghayatan.

Sebelumnya, ketua panitia, Violeta, SE yang juga Koordinator Bidang Organisasi IPPRISIA Kaltim sekaligus Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Samarinda, juga menyampaikan laporan. Ia menyebutkan, kegiatan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2023 ini adalah implementasi perjanjian kerja sama antara Ikatan Pengembang Kepribadian Indonesia (IPPRISIA) Provinsi Kalimantan Timur dengan Program Studi S1-PIN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poiltik Universitas Mulawarman dalam bentuk penyelenggaraan Diskusi Panel.

"Salah satu kelompok sangat rentan yaitu kelompok anak-anak. Diskusi ini bentuk kepedulian dalam mengupayakan terpenuhinya hakhak anak, terlindungi dari berbagai tindak kekerasan, dapat tumbuh serta berkembang secara optimal serta terpenuhinya hak partisipasi anak dalam ikut serta membangun bangsa dan negara," bebernya.

Kegiatan ini melibatkan lembaga pemerintah dan lembaga sosial masyarakat antara lain aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kota Samarinda, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kota Samarinda, Tenaga Kerja Sosial Kemasyarakatan (TKSK) Kota Samarinda, dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Kalimantan Timur. Ada pula berbagai organisasi perempuan di provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda serta Mahasiswa S1-PIN FISIP Universitas Mulawarman. (*)



LOWONGAN





Media KALTIM GRUP membutuhkan tenaga profesional untuk bergabung di tim wilayah Samarinda:

A. 3 JURNALIS

B. 1 SOSMED STRATEGIC

C. 1 DESAINER GRAFIS/EDITING VIDEO

D. 1 PODCAST/MULTIMEDIA DIRECTOR



A: Maksimal usia 25 tahun, berjiwa tim, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kreatif, dan menyukai tantangan. Fresh graduate boleh melamar.

B-C-D: Berjiwa tim, komunikatif, kreatif, dan menyukai tantangan. Fresh graduate boleh melamar.

Deadline Pengirim CV & Lamaran 30 Juli 2023. Pastikan mencantumkan posisi yang dilamar pada subjek email atau pesan WA. Kirimkan ke redaksi@mediakaltim.com atau hubungi WA ke 0853 4894 3982 (ADHI)

Note:

1. Posisi A, diutamakan kandidat berpengalaman bidang jurnalisme atau media.

2. Posisi B, kandidat diharapkan memiliki pengetahuan mendalam tentang media sosial dan strategi pemasaran di platform digital.

3. Posisi C, kandidat diharapkan memiliki kemampuan desain grafis yang kreatif dan mampu melakukan editing video dengan baik.

4. Posisi D, kandidat diharapkan memiliki pengalaman dalam mengarahkan produksi konten podcast dan multimedia serta familiar dengan perangkat lunak terkait.

